

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Siti Nurjajilah

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: sitinurjajilah53@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam UMKM. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola pemberdayaan masyarakat miskin berbasis UMKM dan mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin berbasis UMKM. UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi dan pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha terdiri dari: 1) Pengadaan permodalan 2) Inovasi hasil produksi 3) Perluasan jaringan pemasaran 4) Pengadaan sarana dan prasarana produksi. Pengembangan lainnya ialah dengan adanya bantuan dari pemerintah, diantaranya: a. Dinas Koperasi dan UKM memberikan akses permodalan kepada pengusaha emping jagung terdiri dari dua sumber yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan dana yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial (Bansos) dan Hibah melalui koperasi agar masyarakat ikut peduli akan keberadaan dan fungsi koperasi.

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat miskin; UMKM; modal usaha; koperasi.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional, sebab kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidak mampuan secara ekonomi, melainkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tujuan pembangunan

nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu indikator tercapainya pembangunan Indonesia 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu tercapainya pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan, ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomor satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Penyaluran pembiayaan sejumlah dana atau modal yang khusus diperuntukkan bagi pengembangan usaha orang miskin atau mereka yang berpendapatan rendah dikenal dengan istilah pembiayaan mikro (Microfinance). Orang miskin tidak memiliki akses terhadap bank-bank konvensional, karena mereka dianggap tidak memiliki kredibilitas dalam mengajukan pembiayaan modal usaha. Hal inilah yang melatar-belakangi Muhammad Yunus, seorang Ekonom dari Universitas Chittagong - Bangladesh mendirikan Grameen Bank yang menawarkan sedikit pinjaman kepada masyarakat miskin untuk membangun usaha mandiri yang

dikenal dengan istilah Bank Kaum Miskin. Pinjaman ini menjadi titik awal bagi industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan yang memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Yunus, 2007 : 1).

Di Malang banyak berkembang industri dengan jenis olahan dan skala usaha yang beragam, sehingga Malang merupakan tempat tumbuhnya berbagai macam bentuk industri yang salah satunya usaha “Emping Jagung” yang ada di Kota Malang yang letaknya di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terdaftar jumlah pengusaha “Emping Jagung” sebanyak 14 unit. Industri ini mengolah bahan baku jagung menjadi emping jagung. Jenis usaha inilah yang menjadi produk unggulan Kota Malang. Usaha “Emping Jagung” ini sangat ber-potensi untuk meningkatkan per-ekonomian rakyat karena pada dasarnya Jagung merupakan komoditi tanaman pangan yang sangat mudah untuk dibudidayakan sepanjang musim, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau yang terpenting kebutuhan air tercukupi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha “Emping Jagung” dalam pengembangan usahanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan pra-sarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.

Beberapa permasalahan diatas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kota Malang khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengem-bangan ini akan berpengaruh penting ter-hadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat miskin melalui UMKM Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin berbasis UMKM di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pola-pola pemberdayaan masyarakat miskin berbasis UMKM di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Manfaat

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti.

2. Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Guna perbaikan dan peningkatan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan

Menurut BPS, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72% turun menjadi 7,26% pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% turun menjadi 13,47% pada September 2017.

Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada Septemeber 2017).

Kemiskinan negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu:

1. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat kelompok ini.

Kemiskinan kultural atau ada beberapa ahli yang menyebut dengan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan pada suatu kelompok masyarakat sebagai suatu kondisi dalam suatu kelompok masyarakat yang menurut pandangan kelompok masyarakat lain kondisinya sangat miskin serba kekurangan dan perlu pertolongan segera, namun kelompok masyarakat itu sendiri merasa biasa-biasa saja bahkan "enjoy" dengan keadaannya. Hal inilah yang menyebabkan pihak-pihak lain atau kita akan kesulitan untuk mengetaskan kemiskinan pada kelompok ini.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dimana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas

kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini akan berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Jadi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi. Kategori kemiskinan menurut BPS, ada 3 (tiga) kategori penduduk miskin, yaitu:

- a. Penduduk sangat miskin Adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran non pangan (PNM) atau senilai Rp120.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp480.000,00 per bulan. Jumlahnya diperkirakan 4 juta rumah tangga.
- b. Penduduk miskin Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 1.900 kalori - 2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp150.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp600.000,00 per bulan. Jumlahnya diperkirakan 6 juta rumah tangga.
- c. Penduduk hampir miskin Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 2.100 kalori - 2.300 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp175.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp700.000,- per bulan.

Chambers (1987) menggunakan istilah jebakan kemiskinan (deprivation trap) untuk memahami inti masalah kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, di mana unsur-unsur kemiskinan terjalin erat dalam suatu mata rantai yang saling mempengaruhi yang melihat bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di dunia ketiga, khususnya rakyat pedesaan yang disebabkan oleh saling kait- mengkaitnya faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut seperti lingkaran setan sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan (poverty), merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya, hal ini ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang kurang memadai, diakibatkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dari kemiskinan ini menyebabkan kelemahan pada perangkap kemiskinan yang lainnya;
- b. Fisik yang lemah (physical weakness), yaitu adanya rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga dalam hal mencari nafkah, karena adanya tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah;
- c. Keterasingan (isolation), karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau di luar jangkauan komunikasi, sehingga menopang kemiskinan, dimana pelayanan atau bantuan pemerintah tidak sampai kepada mereka;
- d. Kerentanan (vulnerability), biasanya keluarga miskin tidak mempunyai cadangan baik berupa uang ataupun makanan untuk menghadapi keadaan darurat; dan
- e. Ketidakberdayaan (powerless), orang miskin tidak memiliki daya atau kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang lebih kuat (powerfull) yang sering kali mengeksploitasi mereka. (h. 145).

Koperasi

Definisi koperasi menurut UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha dimana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan mereka menyatukan modal sebagai akibat dari adanya kesamaan kepentingan. Oleh karena itu, persyaratan utama bagi masuknya anggota bukan berdasarkan atas kesanggupan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela melainkan atas dasar dorookingan kepentingan ekonomi anggota.

Koperasi merupakan lembaga usaha yang dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya. Dalam kegiatannya koperasi selalu akan mementingkan pelayanan kepada anggota dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, orientasi pelayanan adalah kepada anggota maka koperasi tidak bisa (tidak boleh) melakukan hubungan (pelayanan) kepada non anggota hanya karena cara itu dianggap lebih mudah dan menguntungkan ketimbang melayani anggota. Untuk menghindari kecendrungan memilih yang lebih menguntungkan (tetapi meninggalkan anggota) maka pengambilan keputusan tidak berdasarkan modal. Pengambilan keputusan atas dasar modal jelas akan mengakibatkan kecendrungan mengutamakan keuntungan daripada kepentingan anggota. Hanel (1989) memberikan definisi tentang organisasi koperasi, menurutnya organisasi koperasi adalah sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan (Sukamdiyo, 1996 : 4).

Pembiayaan Mikro

Banyak strategi pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan persoalan kemiskinan. Salah satu dari strategi yang penting adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif (oleh World Bank disebut *economically active poor*) melalui program penyaluran pembiayaan mikro.

Microfinance dapat meningkatkan akses terhadap aset produktif (seperti tanah, modal, dan kredit), proses, dan pemasaran bagi perempuan. Dengan memberikan akses terhadap modal dan pelatihan, microfinance membantu perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk melawan kemiskinan dan memaksimalkan output ekonomi mereka. Smith (2002) mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga keuangan di pedesaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagai intermediasor antara individu yang ingin menabung dan yang ingin meminjam. Dalam perekonomian modern, modal berperan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga akses kepada lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan penelitiannya di Amerika, Bank cenderung mengurangi perannya di wilayah pedesaan, namun lembaga keuangan non Bank meningkatkan penetrasinya.

Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, menyalurkan berbagai program dana bergulir kepada kelompok masyarakat, seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Raksa Desa dan lain-lain. Sebagai akibat proyek-proyek tersebut maka terbentuklah berbagai macam Lembaga Pembiayaan mikro (LKM) di masyarakat. Langkah ini juga banyak ditempuh oleh banyak lembaga donor dan LSM. Mereka membentuk LKM dengan mereplikasi bermacam-macam model yang telah berhasil diterapkan seperti

model credit union atau model Grameen Bank dengan berbagai variasinya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pandangan pemberdayaan dikemukakan oleh Narayan (2002) menjelaskan Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan suatu upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Definisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Sumodiningrat (2009) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal). Dengan pendekatan umum, bantuan baik berupa dana, prasarana, dan sarana diberikan kepada semua daerah dan semua penduduk secara merata. Pendekatan ini keuntungannya adalah mudah diterapkan. Namun, pendekatan ini sangat mahal dan mempunyai resiko kebocoran yang cukup tinggi. Sedangkan dengan pendekatan khusus, bantuan diberikan kepada penduduk atau daerah yang benar-benar memerlukan, dan kebocoran dapat ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan pendekatan ini, perencanaan dalam penggunaan bantuan ditentukan sendiri oleh masyarakat (h. 193-194).

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan menekankan pada proses, tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) sebagai berikut :

1. Penyadaran, pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dilakukan secara mandiri (self help).
2. Pengkapasitasan, pada tahap ini komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya sebelum diberdayakan. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.
3. Pendayaan, pada tahap ini merupakan target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Keteraturan dan kesinambungan melakukan tahapan dalam proses pemberdayaan menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan. Adi (2003) menjelaskan bahwa secara umum tahapan yang dilakukan tenaga pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (community worker) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

2. Tahap Pengkajian (assessment).

Proses assessment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan (felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Pemformulasian Rencana Aksi. Tahap Pada tahap ini, agen perubah (community worker)

secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap capacity building dan networking.

Tahapan ini mencakup :

- a. Melakukan pelatihan, workshop, atau sejenisnya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka;
- b. Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya; dan
- c. Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan.

Pada tahapan ini melaksanakan kegiatan direncanakan bersama masyarakat sasaran.

6. Tahap evaluasi

Tahapan ini mencakup :

- a. Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
- c. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan.

Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dijalankan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (phasing out strategy).

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka.

Dalam tahapan di atas, dibutuhkan kesiapan dari pelaksana program pemberdayaan agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengelola program membutuhkan *Community Worker* (tenaga pendamping) yang memiliki peran dalam mengawal semua proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

C. Pembahasan

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB dalam (Luz. A. Ein siedel, 1968, h. 9), bahwa: “pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.”

Adapun potensi dan pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha “emping jagung” di Kelurahan Pandanwangi terdiri dari: 1) Pengadaan permodalan 2) Inovasi hasil produksi 3) Perluasan jaringan pemasaran 4) Pengadaan sarana dan prasarana produksi.

Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, ada banyak manfaat dari adanya UMKM yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. “Tujuan mulia yang ingin dicapai sektor publik, yaitu kesejahteraan sosial (social welfare) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu secepatnya me-realisasikan pencapaian kesejahteraan sosial, semakin besar.” (Keban, 2008, h.17-18). Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UMKM dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan terkadang mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Mengenai pemberian akses terhadap sumber-sumber pendanaan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses bagi masyarakat terhadap modal awal. Kucuran dana yang diberikan bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari pemerintah pusat bantuan diberikan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Dana tersebut dibagikan

kepada koperasi bagi para pengusaha UMKM yang akan melakukan pinjaman modal. Sedangkan dari pemerintah provinsi Jawa Timur dana tersebut berupa Bansos dan Hibah yang diberikan kepada koperasi wanita yang telah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah senilai Rp 25 juta per koperasi untuk para pengusaha UMKM yang ingin melakukan peminjaman melalui koperasi tersebut seperti Koperasi Wanita AKU, Koperasi Dewi Sartika, Koperasi Wanita Hijau Daun, Koperasi Puspa Anggun, Koperasi Catleya, Koperasi Aster, Koperasi Teratai, Koperasi AQ-SO, Koperasi, Ayu Makmur, dan Koperasi Dewi Shinta. Sinergi antara pemerintah dengan koperasi dilakukan agar para pengusaha UMKM sadar akan pentingnya berkoperasi.

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menyediakan pelayanan seperti Klinik UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur. Di Klinik UMKM, calon maupun pengusaha UMKM terutama bagi pengusaha emping jagung yang masih memiliki kendala dalam pengembangan usahanya dapat berkonsultasi mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya. Keterbatasan SDM pengusaha emping jagung dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Oleh karena itu betapa pentingnya program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini yang berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam

mengembangkan usaha yang dijelankannya.

Kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ialah :

1. Meningkatnya harga bahan baku, bahan baku merupakan bahan pokok yang digunakan dalam mengolah suatu jenis bahan menjadi produk yang dapat dihasilkan dengan kreatifitas dan inovasi semaksimal mungkin. Kenaikan harga baku ini tentu saja mempengaruhi harga penjualan, apalagi bahan baku diperoleh dari supply, sehingga mereka memerlukan biaya yang lebih dibandingkan jika mendapatkan bahan baku dari kebun sendiri. Inilah yang menjadi kendala karena mereka hanya akan mensuplai bahan baku sesuai budget yang mereka miliki. Otomatis produksi yang dihasilkan akan terbatas padahal permintaan pasar cukup banyak.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam melakukan usaha. Dari hasil penelitian, mayoritas ilmu pengetahuan serta keterampilan diturunkan dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu dari segi kreatifitas mereka kurang bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.
3. Memiliki permasalahan dalam permodalan, modal adalah faktor terpenting dalam membuka usaha. Karena UMKM merupakan usaha rumahan yang mengandalkan modal sendiri, maka dalam permodalan ini memerlukan bantuan dari pemerintah. Pengusaha emping jagung di Kelurahan Pandanwangi mengaku bahwa mereka menggunakan modal dari tabungan sendiri. Walaupun untuk awal pengumpulan modal mereka sangat kesulitan.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam menunjang pengembangan UMKM. Karena itu, sarana dan prasarana dalam melakukan usaha harus mendukung. Seperti sarana dalam pemasaran produk atau sarana dalam proses pembuatan produk. Pengusaha emping jagung

mayoritas sudah memiliki tempat untuk pemasaran produk emping jagung kemasan. Adapun pengusaha emping jagung yang memiliki cabang Toko lebih dari satu. Tetapi mengenai proses pembuatan emping jagung, pengusaha mengaku kurang memiliki lahan yang luas dalam proses pembuatan emping jagung. Karena menurut mereka dengan lahan yang luas akan dapat menambah produksi yang dihasilkan. Kendala inilah yang membuat hasil produksi mereka terbatas.

5. Kurangnya akses pemasaran produk di kelurahan pandanwangi, pengusaha UMKM emping jagung memiliki lokasi yang saling berdekatan. Produk yang dihasilkan pun juga sama. Oleh karena itu, persaingan di dalam pemasaran produknya merupakan hal yang wajar terjadi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengusaha emping jagung mampu meningkatkan kreativitas mereka dengan memproduksi bahan baku jagung menjadi aneka makanan atau camilan berbeda. Tetapi disini pengusaha emping jagung kurang dapat mengeksplor segala kreativitas yang dimiliki untuk menunjang kemajuan dalam mengembangkan usahanya. Karena dengan adanya persaingan seperti itu mereka akan semakin sulit untuk memasarkan hasil produknya. Inilah yang menjadi kendala mereka di dalam memasarkan hasil produknya.
6. Pengusaha emping jagung di Kelurahan Pandanwangi perlu lebih meningkatkan kreatifitas dan mengasah potensi yang dimiliki dengan menambah wawasan, pengalaman, dan pelatihan yang telah difasilitasi oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dengan pasar internasional serta dapat mengatasi manajemen keuangan yang mayoritas masih menggunakan sistem tradisional.
7. Perlu adanya sosialisasi yang merata serta membuka informasi seluas-luasnya bagi UMKM di Kota Malang terhadap program-program dan pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Malang, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan

kemiskinan dan pengangguran dengan mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

8. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan dalam mengasah kreatifitas sumber daya produktif agar lebih berinovasi dalam menghasilkan suatu produk UMKM serta memberikan jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar agar usaha yang dijalankan lebih berkembang mengingat Kota Malang merupakan kota wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan.
9. Pemerintah perlu mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya serta perlunya peningkatan sarana dan prasarana seperti difungsikannya kembali Klinik KUMKM sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mengenai UMKM.
10. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebaiknya lebih mengupdate jumlah UMKM yang ada di seluruh Kota Malang agar lebih mudah dalam memberikan pelatihan sesuai dengan klasifikasi jenis usahanya.

D. Kesimpulan

Pengembangan kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam meningkatkan potensi serta kemajuan usahanya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Pengadaan permodalan, mayoritas pengusaha emping jagung memulai usahanya menggunakan modal dengan tabungan sendiri.
2. Inovasi hasil produksi, untuk menarik daya minat masyarakat sebagai konsumen pengusaha emping jagung telah melakukan inovasi terhadap hasil produksinya dengan memberikan berbagai macam rasa dalam produk emping jagung agar masyarakat tidak bosan dan dapat memilih sesuai selera. Inovasi ini terbukti lebih meningkatkan daya tarik masyarakat dibandingkan produk sebelumnya yang hanya memiliki rasa original saja.

3. Perluasan jaringan pemasaran, pengusaha emping jagung telah menggunakan internet sebagai sarana dalam memasarkan hasil produksinya berbekal pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang serta memasarkan ke supermarket, Pusat Oleh-oleh Kota Malang, dan beberapa toko yang dimilikinya. Dari situlah jaringan pemasaran semakin meluas hingga ke kota-kota lainnya.
4. Pengadaan sarana dan prasarana produksi, untuk awal dalam membuka usaha emping jagung alat-alat yang digunakan sebagai proses produksi diperoleh dengan melakukan kredit ke pihak lain disebabkan mahalnya harga barang dan minimnya modal karena modal didapat dari tabungan sendiri. Selain itu, pengusaha emping jagung yang sudah berkembang telah memasarkan hasil produksinya ke tokok-toko yang mereka miliki sebagai sarana pemasaran.
5. Pengembangan lainnya ialah dengan adanya bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, diantaranya: a. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses permodalan kepada pengusaha emping jagung terdiri dari dua sumber yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi berupa bantuan sosial (Bansos) dan Hibah melalui sepuluh Koperasi Wanita yang ada di Kota Malang agar masyarakat ikut peduli akan keberadaan dan fungsi koperasi.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi masyarakat terutama pengusaha emping jagung yang diadakan rutin setiap bulan dalam setahun seperti Pelatihan Produk, Pelatihan IT *Entrepreneur*, Pelatihan Manajerial dan Pelatihan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun.

Dalam meningkatkan pemasaran produk, Dinas Koperasi dan UKM Kota

Malang telah membantu dalam mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pengusaha UMKM Kota Malang dan telah mengajak pengusaha emping jagung untuk turut serta yang dilaksanakan di tempat- tempat yang ramai dikunjungi wisatawan seperti mall- mall yang ada di Kota Malang, bahkan di Balai Kota Malang pernah mengadakan pameran produk UMKM.

Kendala yang dihadapi oleh UMKM “emping jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam mengembangkan usahanya yaitu meningkatnya harga bahan baku, sumber daya manusia yang terbatas, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya akses pemasaran produk

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Feni Dwi, Hardjanto, Imam, Hayat, Ainul. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)”, 14 April 2018, dari <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf>.
- Suarja, Wayan. 2007. “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah.” 14 April 2018, dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/Makalah-33.pdf>.
- Supardjan, Syafar. 2012. “Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor-Jawa Barat)” 9 April 2018, dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307184-T31166Pemberdayaan%20masyarakat.pdf>.